

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelian.....	4
BAB II. LANDASAN TEORI	5
2.1 Pengelolaan Keuangan	5
2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah	6
1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah	6
2. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah	6
3. Prinsip Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	7
4. Asas Umum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	8
2.3 Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).....	9
1. Pejabat Dan Petugas Pengelolaan Keuangan SKPD.....	9
2. Dasar Hukum	10
2.4 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	10
1. Laporan Keuangan Menurut PP No.71 Tahun 2010.....	11
2. Karakteristik Laporan Keuangan Menurut PP No.71	13
2.5 Peran Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	14
2.6 Sistem Informasi Manajemen (SIM).....	15
1. Pengertian SIM	15
2. Fungsi Utama Dari SIM.....	15
3. Elemen-elemen SIM	16
2.7 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	16
1. Sejarah Aplikasi SIMDA	16

	2.	Tujuan Pengembangan Program Aplikasi SIMDA.....	17
	3.	Keunggulan dan Manfaat SIMDA	17
	4.	Dasar Hukum Pembuatan SIMDA.....	17
	5.	Macam-Macam Aplikasi SIMDA	18
	6.	Langkah – Langkah Pengoprasian SIMDA	21
2.8		Fokus Penelitian	27
2.9		Penelitian Terdahulu	27
BAB III.		METODE PENELITIAN.....	28
3.1		Jenis Penelitian	28
3.2		Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
3.3		Sumber Data	28
3.4		Teknik Pengumpulan Data	29
3.5		Teknik Analisis Data	31
BAB IV.		HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1		Gambaran Umum	33
	1.	Sejarah Organisasi/Perusahaan	33
	2.	Kegiatan Instansi.....	34
	3.	Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan Pencapaian BLH 5 Tahun Terakhir.....	34
	4.	Struktur Organisasi	36
	5.	Sumber Daya Subbagian Perencanaan dan Keuangan BLH	36
4.2		Hasil Penelitian.....	38
	1.	Laporan Keuangan BLH Provinsi Sulawesi Utara	38
4.3		Pembahasan	42
	1.	Proses – Proses Dalam SIMDA Keuangan	42
	2.	Peran SIMDA Keuangan Dalam Proses Pengelolaan Keuangan	45
	3.	Ketersediaan Sarana Penunjang	46
	4.	Laporan Keuangan Yang Dihasilkan.....	47
BAB V.		KESIMPULAN & REKOMENDASI	50
5.1		Kesimpulan	50
5.2		Rekomendasi.....	51
		DAFTAR PUSTAKA	52
		LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin, karena dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan itu berbanding lurus dengan keberhasilan suatu organisasi.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk mengelola keuangan dengan ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel karena pada hakekatnya uang yang dikelola merupakan uang yang berasal dari rakyat.

Untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik pemerintah dalam hal ini terus berupaya menciptakan suatu aturan – aturan yang dirasa perlu untuk kemudian dapat menjadi acuan atau standar dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 merupakan salah satu aturan yang dibuat pemerintah untuk lebih menyempurnakan aturan-aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Ada perubahan yang sangat besar dari peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 terletak pada standar akuntansi pemerintah (SAP) yang digunakan. Dalam PP No.71 Tahun 2010 SAP yang diwajibkan pada setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah adalah SAP yang berbasis akrual.

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, pemerintah tidak semata-mata hanya menerbitkan peraturan dan standar pengelolaan keuangan tetapi juga menciptakan suatu wadah yang dianggap perlu untuk mendukung aturan yang sudah dibuat tersebut.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat terlebih dalam pengelolaan keuangan menuntut pemerintah untuk menciptakan suatu sistem komputerisasi yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan yang nantinya akan melengkapi sistem manual yang dianggap belum efektif dan efisien.

Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan suatu wadah yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan pemerintah menjadi lebih baik. SIM merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama (Mcleod : 2010). Tetapi dalam prakteknya SIM tidak dapat menyediakan informasi yang tepat tanpa didukung oleh suatu perangkat lunak yang handal.

Pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2003 membentuk Satuan Tugas Pengembangan Program Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Menurut BPKP Aplikasi SIMDA ini dapat dimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi *multiuser* dan teknologi *client/server*, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggung jawaban keuangan baik dilaksanakan di SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) maupun di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Aplikasi SIMDA ini memiliki 4 (empat) macam (tipe) yaitu:

1. Program Aplikasi SIMDA Keuangan.
2. Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).
3. Program Aplikasi SIMDA Gaji.
4. Program Aplikasi SIMDA Pendapatan.

Namun dalam prakteknya tidak semua instansi pemerintah menggunakan semua tipe program aplikasi SIMDA tersebut, tetapi melihat tugas dan fungsi dari masing – masing instansi terkait.

Sampai dengan bulan September 2015, Program Aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 425 Pemda dari 542 pemerintah daerah yang ada atau sebanyak 78,41%. Pemerintah Daerah Sulawesi Utara (Sulut) merupakan salah satu Pemda yang menggunakan Aplikasi SIMDA untuk membantu pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIMDA tersebut diterapkan pada semua instansi Pemerintah Daerah di Provinsi Sulut, salah satu merupakan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulut.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu instansi Pemerintah Daerah Sulawesi Utara yang mempunyai fungsi dan tugas yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Badan :

Badan Lingkungan Hidup sebagai unsur pendukung tugas Gubernur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

2. Fungsi Badan :

- a. Perumusan kebijakan teknis
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Pada tahun 2015 BLH Provinsi Sulut mendapatkan anggaran sebesar Rp8.475.794.711 dan direalisasikan sebesar Rp8.316.544.711 (98,12%) untuk belanja operasi dan Rp159.250.000 (1,88%) untuk belanja modal. Dalam pengelolaan keuangan tersebut BLH Provinsi Sulut sangat dibantu dengan adanya program aplikasi SIMDA, karena dengan adanya program aplikasi tersebut pengelolaan keuangan di BLH Provinsi Sulut menjadi lebih cepat dan ekonomis. Pada tahun 2015 pengelolaan keuangan pada setiap SKPD sudah harus sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 terlebih pada laporan keuangan yang dihasilkan, namun hal tersebut sangat terbantu dengan program aplikasi SIMDA yang dirancang sesuai dengan pelaturan atau SAP yang berlaku saat ini. Sebelum penerapan program aplikasi SIMDA berbasis akrual tentunya setiap SKPD dituntut untuk mempersiapkan setiap unsur – unsur penunjang dari program aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual tak terkecuali untuk BLH Provinsi Sulut.

Setelah penulis mengamati perkembangan pengelolaan keuangan pada BLH Provinsi Sulut setelah penerapan program aplikasi SIMDA berbasis akrual, maka mendorong penulis untuk meneliti penerapan aplikasi SIMDA berbasis akrual pada instansi BLH provinsi Sulut dengan mengambil judul tugas akhir: ”**Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Berbasis Akrual**

Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana penerapan program SIMDA berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulut.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian penulis hanya membatasi pada program aplikasi SIMDA Keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan program aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulut.
2. Untuk mengetahui unsur – unsur pendukung dalam program aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan dalam proses pengelolaan keuangan SKPD serta dapat menjadi masukan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
2. Penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk pengembangan penelitian berikutnya dan dapat juga menjadi masukan dalam penyusunan kurikulum pembelajaran.
3. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan di bidang penelitian dan juga peneliti dapat lebih mengerti peran Program SIMDA berbasis akrual dalam proses pengelolaan keuangan.